



**PUTUSAN**

Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

**PENGUGAT**, lahir di xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, lahir di xxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx tanggal 18 Juli 2024, dengan register perkara nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal xxxxxxxx dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, dengan Kutipan Akta  
Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  
di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx  
selama xxxxxxxxxxxxxxxxx bulan kemudian pindah kerumah bersama yang  
masih berada dialamat yang sama sampai pisah;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat  
telah dikaruniai xx orang anak yang masing-masing bernama:-  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx tahun  
(xxxxxxxxxxxxxxxx); - xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx);

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun sejak bulan  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tahun xxxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat dan Tergugat mulai  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang  
disebabkan:

1.1. Bahwa sering xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

1.2. Tergugat sering xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

1.3. Tergugat tidak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan  
Tergugat terjadi pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dimana saat itu  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pergi xxxxxxxxxxxxxdan saat ini xxxxxxxxxxxx bertempat  
tinggal di rumah kerabat xxxxxxxx yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxx  
sementara Tergugat tinggal dirumah bersama yang berada di xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

6. Bahwa antara xxxxxxxxxxxxxdan Tergugat xxxxxxxxx kurang lebih  
xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) bulan xxxxxxx (xxxxxxxx) hari lamanya;

7. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat tidak mampu yang telah  
mendapatkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah xxxxxxxxx nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxx;

Halaman 2 dari 15  
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx & xxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 15  
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh KUA xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Gorontalo, telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

**a. SAKSI 1**, lahir di xxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kemudian pindah dan tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) orang anak, anak yang pertama sudah berkeluarga dan anak kedua sudah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Halaman 4 dari 15  
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lbt



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan xxxxxxxxxxxx kepada zxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tergugat xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan xxxxxxxxxxxx sampai sekarang sudah berjalan xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini xxxxxxxxxxxx tinggal bersama kerabat Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa sebagai saudara kami sudah pernah berupamun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

**b. SAKSI 2**, lahir di xxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, saksi mengaku sebagai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat telah bersumpah menurut agama Islam dan telah



memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kemudian pindah dan tinggal di rumah xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) orang anak, anak yang xxxxxxxxxxxxxxxx sudah berkeluarga dan xxxxxxxxxxxxxxxx sudah xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan xxxxxxxxx;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan xxxxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang sudah berjalan xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxx lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman xxxxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini xxxxxxxxxxxx tinggal bersama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat tetap tinggal di rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Pengugat dan Tergugat bahkan pernah dimediasi di depan ayahanda xxxxxxxxx xxxxxxxxx, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 15  
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh xx, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 26 Maret 1996, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai xxxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxx) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak xxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 9 dari 15  
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxxxxx, serta tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

#### Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik secara fisik dan/atau non fisik, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lagi harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak bulan September 2023, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 15  
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْقِيرَ إِذَا ادَّعَتْ  
إِضْرَارًا لَزَوْجٍ بِهَا إِضْرَارٌ لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ  
أَمْثَالَهُمَا**

Halaman 12 dari 15  
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada Majelis Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الْمَرْجُوعَةِ لِرُجُوعِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Majelis Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 12 Juli 2024 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka berdasarkan ketentuan Pasal 60B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 273 R.Bg jo Pasal 8 Peraturan

Halaman 13 dari 15  
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak Mampu, **biaya perkara dibebankan kepada Negara;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama xxxxxxxx Tahun 2024;

### Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu, tanggal **7 Agustus 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Safar 1446** Hijriah, oleh **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman **14** dari **15**  
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Lbt



**Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hamsin Haruna, S.H.I.**

**Mohamad Salman Podungge,**

**S.H.I., M.Sos.**

Panitera Pengganti,

**Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00,-
2. Biaya	: Rp.	0,00-
Proses		
3. Biaya	: Rp.	0,00-
Panggilan		
4. PNBP	: Rp.	0,00-
Panggilan		
5. Redaksi	: Rp.	0,00-
6. Meterai	: Rp.	0,00-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>0,00- (nol rupiah)</b>